

SP12 - 08 - 071

# DAMPAK PSIKOLOGIK REFORMASI POLRI TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA POLRI.

Sarlito Wirawan Sarwono<sup>1\*</sup>

## Abstract

*The Indonesian Police (Polri) has been reformed since 1999, when it was separated from the rest of the armed forces (army, navy and air force). Much improvement has been achieved in Polri's working systems, infrastructures, and culture, which is reflected in its success in fighting terrorism; uncover narcotic networks; dealing with mass action etc. On the other hand, there are increasing numbers of police officers who are committed in unwanted behavior, particularly abuse of fire arms. A limited study has been carried out in Bali, using local police officers as subjects, which reveals that the obligatory psychological test for all police personnel who are recruited to carry fire arms is able to differentiate potentially troublesome officers from the potentially trouble free ones. The problem is that the psychological test is not always executed due to limited number of police psychologists and inadequate budget. Efforts of the commanders and supervisors to minimize fire arms abuse by giving more personal attention to the lower ranking officers are also insufficient, due to the lack of commitment of the superiors, and even the policy makers in Polri H.Q. to give higher priority to HR development.*

Akhir-akhir ini, selama enam bulan pertama tahun 2007, masyarakat dikejutkan dengan berbagai peristiwa yang menyangkut perilaku anggota Polri seperti: penembakan Wakapolwiltabes Semarang oleh anak buahnya sendiri; anggota Polri di NTB menembak pacar gelap isterinya dan akhirnya menembak dirinya sendiri; seorang mahasiswa PTIK minta cuti ke tempat dinas terakhir di Papua, hanya untuk menembak mantan anak buahnya dan kemudian menembak dirinya sendiri; seorang polisi dikeroyok massa karena mabuk; di Purwokerto seorang anggota Polri mengancam akan meledakkan granat di kantornya sendiri; di Polsek Taman Sari Jakarta, seorang anggota patroli Sabhara menembak kawannya sendiri ketika sedang mabuk di ruang karaoke, dan seterusnya.

<sup>1</sup> \* Guru Besar Psikologi, Ketua Program KIK-UI, Pengajar di Berbagai Perguruan Tinggi

Tentunya kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, "Fenomena apa yang sedang terjadi di tubuh Polri?". Masalahnya, kondisi ini bertolak belakang dengan prestasi-prestasi gemilang Polri yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia sendiri, melainkan juga mendapat pujian internasional, seperti pemberantasan Narkoba, pengungkapan jaringan teroris dan sebagainya. Tentunya ada persoalan-persoalan yang belum terpecahkan yang menyangkut kondisi psikologis anggota Polri pasca reformasi Polri 1999.

### **Studi di Polda Bali.**

Pada bulan April 2007, atas permintaan Kapolda Bali, Program Kajian Ilmu Keplolisian (KIK) UI, dengan bekerja sama dengan Bagian Psikologi Polda Bali telah mengadakan penelitian terbatas di Polda Bali tentang "Identifikasi kepribadian penyalahguna senjata api (Senpi) di lingkungan Polri"<sup>2</sup>. Dalam penelitian itu telah dilakukan pemeriksaan dan wawancara psikologik terhadap 7 orang anggota Polda Bali pemegang Senpi yang tidak pernah menyalah gunakan senjatanya (PD/Pengguna Disiplin) dan 7 orang anggota Polda Bali pemegang Senpi yang tercatat pernah melanggar disiplin penggunaan Senpi (PI/Penyalahguna Indisiplin)<sup>3</sup>. Selain itu diwawancara juga 5 orang Kasatfung di lingkungan Polda Bali yang anggota ta-anggotanya bersenjata.

Dari perbandingan hasil pemeriksaan psikologik terhadap kelompok PD dan PI terbukti bahwa kelompok PD lebih tinggi dalam skor-skor kecerdasan, pengendalian diri, penyesuaian diri, dan kepercayaan diri, sebaliknya lebih rendah dalam skor neurotisisme<sup>4</sup> dibandingkan kelompok PI. Hasil tes kecermatan dan ekstraversi<sup>5</sup> tidak berbeda antara kedua kelompok itu.

Sementara itu dari hasil wawancara juga ditemukan perbedaan pola perilaku yang berbeda antara PD dan PI. Anggota PD selalu mengikuti prosedur dalam memperlakukan Senpinya, misalnya jika tidak sedang digunakan, Senpi selalu disimpan di rumah, dalam kotak terkunci yang dimasukkan dalam lemari terkunci, dan kedua kunci dibawanya sendiri. Sedangkan anggota PI cenderung

2. Dilaporkan kepada Kapolda Bali tanggal 19 April 2007 (tidak dipublikasikan); Anggota tim inti: Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, psikolog (Ketua), AKBP Drs. Drajat Wibawa, M.Si, psikolog, dan Kompol. Priyo Wira Nugroho, SIK, M.Si.

3. Tes psikologi yang diberikan adalah tes IQ (CHFIT), tes standar untuk calon Bintara Polri "Ba-Cerdas" (Kepribadian-Kecermatan-Kecerdasan) dan tes Inventori Kepribadian Eysenc.

4. Gangguan jiwa ringan.

5. Sifat terbuka

teledor dalam memperlakukan Senpinya, seperti meninggalkannya di tas di mobil ketika sedang bersembahyang di pura, membawanya ketika cuti keluar kota, digunakan untuk menembak anjing yang mengejanya, atau digunakan untuk menakut-nakuti laki-laki yang berselingkuh dengan ibunya.

Hal ini berarti bahwa tes psikologik sangat boleh jadi mampu mendeferensiasi (memilah) antara kepribadian calon pemegang Senpi yang diperkirakan bermasalah dari yang tidak<sup>6</sup>.

Masalahnya adalah bahwa tes psikologi tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. Pol : 04 tahun 2007, tanggal 12 Januari 2007 tentang "Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia"<sup>7</sup>. Demikian pula upaya-upaya pencegahan lainnya tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan sebelumnya yakni:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara 1948 Nomor 17)
- Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/484/XII/1982 tanggal 10 Desember 1982 tentang Pengesahan Buku Juklak Polri tentang Prosedur Penggunaan dan Pengawasan Senpi bagi Anggota Polri
- Surat Telegram Kapolri No.Pol.: ST/445/1993 tanggal 18 Oktober 1993 tentang Pengetatan Ijin Pinjam Pakai Senpi dengan Pemeriksaan Psikologi
- Surat Telegram Kapolri No.Pol.: ST/72/II/1997 tanggal 22 Februari 1997 tentang Pengetatan Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senpi
- Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senpi Non-Organik TNI - Polri

<sup>6</sup> Asumsi ini masih harus dibuktikan dengan penelitian yang menggunakan sampel yang lebih besar (jika dimungkinkan, seluruh Indonesia).

<sup>7</sup> Perkap ini secara otomatis merevisi dan menggugurkan pedoman atau ketentuan lama yang berlaku sebelumnya yaitu, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1381/IX/1998 tanggal 15 September 1998 tentang "Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Psikologi Calon Pemegang Senjata Api".

Dalam hal pemeriksaan psikologik, kendala utamanya adalah keterbatasan personil di lingkungan Biro Psikologi Mabes Polri dan Bagian Psikologi di setiap Polda, khususnya yang berkualifikasi psikolog. Tenaga yang ada senantiasa disibukkan dengan kegiatan rutin dari tahun ke tahun, seperti seleksi SPN, Akpol, Sespim dan Lemdik-lemdik lainnya, sehingga tidak ada kesempatan untuk melaksanakan pemeriksaan untuk anggota-anggota Polri calon pemegang Senpi. Apalagi jika harus melakukan pemeriksaan berkala setahun sekali, pada umumnya hasil pemeriksaan psikologik hanya valid selama setahun.

Padahal di lapangan, kebutuhan sudah sangat mendesak. Satuan-satuan yang harus dipersenjatai seperti Brimob, Reserse, Detasemen 88 dan sebagainya harus tetap bekerja, dengan mutasi-mutasi personil sebagaimana diperlukan oleh tugas yang harus segera dilaksanakan. Seringkali penyerahan senjata kepada anggota dilaksanakan tanpa menunggu pemeriksaan psikologik lagi, dan setelah diberikan juga tidak pernah di periksa psikologik ulang.

Dalam pada itu, dari hasil wawancara dengan anggota kelompok PD dalam penelitian di Polda Bali diperoleh masukan bahwa penyalahgunaan Senpi sebenarnya bisa dikurangi dengan melaksanakan pengawasan yang lebih ketat, dan para komandan harus lebih memperhatikan anak buah, dengan melakukan pendekatan-pendekatan pribadi, sehingga komandan dapat mengetahui secara dini seandainya ada potensi masalah pada anggotanya. Namun diakui bahwa sekarang para komandan kurang dekat dengan anak buahnya. Padahal untuk mengidentifikasi anggota yang potensial menyalah gunakan Senpi bisa dilakukan dengan mengamati anggota yang egois, dan cenderung pamer (sok).

Faktor penyebab lain dari penyalahgunaan Senpi, menurut para PD, adalah stres dari lingkungan (tugas dan/atau keluarga), dan depresi anggota.

### **Stresor pasca reformasi.**

Pernyataan para informan dalam penelitian Polda Bali tersebut di atas, sangat relevan dengan kondisi Polri secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui, sejak dipisahkannya Polri dari ABRI pada tahun 1999, Polri telah melakukan berbagai perubahan, baik pada aspek struktural, instrumen maupun kultural. Hasilnya memang belum maksimal, walaupun proses reformasi itu telah berkala delapan tahun, akan tetapi masyarakat sudah mulai melihat hasil kongkritnya, mulai dari efektivitas dalam pembongkaran kasus narkoba dan terorisme seperti yang sudah

disebutkan di atas, sampai pada teknik penanganan unjuk rasa, perlakuan pada korban/saksi perempuan dan anak-anak, pelayanan surat-surat ijin dan surat-surat keterangan dan lain-lain.

Di sisi lain, sama seperti seluruh jajaran pegawai negeri di seluruh NKRI, masalah kesejahteraan anggota belum tersentuh. Gaji anggota Polri masih belum mencukupi untuk menopang hidup sekeluarga pada taraf yang minimal sekalipun. Padahal tugas-tugas makin berat, dan masyarakat, termasuk para pembentuk opini seperti anggota DPR, pakar, tokoh masyarakat dan lain-lain, tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan teknis. Mereka tahunya polisi sudah mendapat anggaran yang jauh lebih besar dari semasa masih di bawah ABRI, sehingga pekerjaan pun harus beres.

Di lapangan tekanan dari opini publik ini dirasakan oleh individu-individu anggota Polri sebagai stresor yang makin hari makin berat. Seorang anggota Polantas di Polda Metro misalnya, sudah harus apel jam 05.00 di Polda di Semanggi, sementara rumah kontrakannya di daerah Bekasi. Mau tidak mau dia harus kredit motor agar setiap hari ia bisa berangkat jam 04.00 dari rumahnya untuk mengejar apel jam 05.00 tersebut. Gajinya harus disisihkan untuk kontrak rumah dan cicilan sepeda motor, sebelum bisa dimanfaatkan oleh keluarganya. Wajarlah kalau anggota itu tidak bisa tenang bekerja ketika ia mengatur lalu lintas di keramaian ibu kota. Demikian pula seorang anggota reserse yang mengejar tersangka, harus meninggalkan rumah sehari-hari, tanpa ia bisa meninggalkan uang yang cukup untuk anak-isterinya.

Stres itu masih ditambah lagi dengan perlakuan tidak manusiawi yang diterima langsung dari masyarakat, seperti yang dialami para anggota Sabhara yang dicaci maki, bahkan diludahi oleh pengunjuk rasa, sementara perintah komandannya wanti-wanti tidak boleh membalas dalam bentuk apapun. Tidak mengherankan jika sampai ada empat anggota Sabhara di Jayapura yang harus tewas sia-sia, karena ketika dikeroyok masa dia tidak bersenjata dan tidak di-back up oleh pasukan bersenjata (kalau pun ada, tidak boleh menembak), yang konon demi menegakkan HAM.

## Penutup.

Dari uraian di atas nampaknya kita harus menghadapi realita bahwa masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh Polri. Ketiadaan biaya dan personil

untuk pelaksanaan pemeriksaan psikologik calon pemegang Senpi, yang telah menyebabkan persoalan yang begitu serius, hanya merupakan bagian kecil dari persoalan manajemen Polri yang jauh lebih besar, yaitu penyesuaian manajemen Polri dalam menghadapi reformasi.

Salah satu hal yang merupakan prioritas tertinggi untuk ditinjau kembali dalam pengembangan manajemen baru Polri, adalah penanganan SDM Polri. Mulai dari sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karir dan pembinaan, termasuk kesejahteraan anggota dan perwira harus dibuat sedemikian rupa sehingga stres institusi akibat reformasi ini dipikul bebannya oleh institusi Polri, bukan oleh anggota-anggotanya sebagai perorangan, yang pada gilirannya akan menyebabkan ledakan-ledakan perilaku indisplin yang meresahkan masyarakat seperti tersebut di atas.

Tentu saja tidak mudah untuk mereformasi manajemen Polri sehingga lebih berpihak kepada faktor SDM, karena selama ini faktor SDM selalu dianggap sebagai hal yang paling tidak penting dalam skala prioritas organisasi (karena alasan keterbatasan anggaran). Namun pimpinan Polri harus mampu membuat terobosan kalau tidak ingin Polri berkembang ke arah yang makin merisaukan semua pihak.

